

Perencanaan Pengembangan Wisata Alam Dan Pendidikan Lingkungan Di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Cikampek

Bambang Setiyono^{1,2}, Sarwono³, Hermawan³

¹ Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang

² Badan Litbang Kehutanan, Kementerian Kehutanan

³ Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang

Abstrak

KHDTK Cikampek merupakan kawasan hutan yang difungsikan untuk tempat penelitian dan pengembangan kehutanan. Dalam perkembangannya, kawasan ini juga dimanfaatkan sebagai tempat wisata bagi masyarakat sekitar. Pemanfaatan KHDTK Cikampek sebagai tempat wisata yang tidak terkelola ini menimbulkan berbagai permasalahan. Puslitbang Peningkatan Produktivitas Hutan (Pusprohut), sebagai pengelola kawasan merespon dinamika perkembangan yang terjadi dengan mewacanakan pengembangan wisata alam dan pendidikan lingkungan. Pengembangan kawasan dilakukan agar kegiatan wisata dapat dikelola sekaligus dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kawasan ini memiliki banyak potensi diantaranya sebagai ruang terbuka hijau terluas di Kab Karawang, memiliki jenis-jenis pohon eksotis (habitat alamnya ada di luar negeri), masyarakatnya mendukung dan lokasinya yang mudah dijangkau. Pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan pengembangan kawasan ini adalah Pusprohut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, akademisi dan masyarakat. Pemerintah memiliki peran yang penting khususnya di bidang pembuatan kebijakan, akademisi menjadi konsultan pembantu dan masyarakat dapat memberikan masukan, saran serta pemikiran dalam proses perencanaan melalui diskusi atau pertemuan.

Kata Kunci: perencanaan, wisata alam, pendidikan lingkungan, kawasan hutan, stakeholders.

Abstract

Cikampek KHDTK is a forested area functioned as forest research and development site. Recently, this area serves not only as forest research and development site, but also as public recreation park. Area utilization as public recreation park has caused several problems. The area manager responds this dynamics with stating discourses on nature tourism development and environmental education. This area development is aimed to organize respective area, also to increase community's income. This area potential are as follows: it is the largest RTH in Karawang Regency and become urban forest substitution, good public perception on the area, exotic foreign trees, and accessible location. Nature tourism development and environmental education planning accomodating stakeholder's need and want. Stakeholders involved are Pusprohut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, academician, and community. Government has strategic role in planning, especially in policy-making. Academician becomes the consultant, while community contribute ideas and consideration through meeting or discussion with planners.

Keywords: planning, nature tourism, environmental educations, forest area, stakeholders.

PENDAHULUAN

Pembangunan sektor kehutanan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Di dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan tahun 2010-2014 disebutkan bahwa pembangunan kehutanan ditujukan guna memberikan dampak pada pemanfaatan sumberdaya hutan untuk pembangunan ekonomi, serta peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup, yang secara bersamaan akan memberikan kontribusi

pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Cikampek merupakan kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kepentingan penelitian dan pengembangan kehutanan. Pembentukan KHDTK merupakan amanat Undang-Undang no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mana pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus yaitu: (a) penelitian dan pengembangan, (b) pendidikan dan latihan, serta (c) religi dan budaya. Dalam perkembangannya, KHDTK Cikampek tidak hanya sebagai tempat uji coba kegiatan penelitian bidang kehutanan, melainkan juga dimanfaatkan sebagai lokasi wisata bagi masyarakat. Hal ini menjadi semakin

*Alamat korespondensi:

Bambang Setiyono

Email : seno_alrumi@yahoo.com

Alamat : Gang Kundi no. 23

Rembang, Jawa Tengah, 59218

berkembang setelah pada tahun 2006, kawasan ini digunakan sebagai lokasi syuting film laga yang menyebabkan banyak masyarakat setempat masuk untuk membuka warung-warung makanan dan minuman.

Dinamika perkembangan pemanfaatan kawasan ini menuntut adanya respon dari pemerintah untuk mengelola kawasan agar lebih tertata dan memiliki manfaat yang lebih luas. Pada awal tahun 2012, Puslitbang Peningkatan Produktivitas Hutan sebagai pengelola kawasan, telah mewacanakan pengembangan wisata alam dan pendidikan lingkungan di KHDTK Cikampek. Pengembangan sektor wisata selain untuk menata kawasan juga diharapkan dapat membawa dampak yang luas terhadap perekonomian di suatu daerah. Hal ini dinyatakan oleh Goeldner dalam Gufron (2009:5), bahwa pariwisata adalah suatu usaha ekonomi potensial dan sebagai pembangkit perekonomian suatu kota, propinsi, kabupaten, atau daerah tujuan wisatawan, dari pengeluaran mereka.

Wisata alam menjadi pilihan utama dalam pengembangan wisata di KHDTK Cikampek, karena diyakini memiliki dampak yang kecil bagi lingkungan. Berbeda dengan wisata massal yang seringkali aktivitas wisatanya merugikan bagi ekosistem lokasi wisata, ekowisata berkontribusi dalam membangun kesadaran konservasi lewat pendidikan [5]. Pendidikan lingkungan merupakan proses penyadaran tentang pentingnya lingkungan hidup untuk mendorong terwujudnya kepedulian semua lapisan dan golongan masyarakat yang sadar akan lingkungan.

Pengembangan wisata alam dan pendidikan lingkungan di KHDTK Cikampek akan berjalan dengan baik jika memiliki perencanaan yang baik pula. Perencanaan merupakan suatu proses berkelanjutan yang melibatkan keputusan atau pilihan, tentang cara-cara alternatif menggunakan sumber daya yang tersedia, dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu pada beberapa waktu dimasa depan [2]. Perencanaan pengembangan ekowisata yang dilakukan dengan baik tentu akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan dapat pula memperkecil semua efek sampingan yang kurang menguntungkan. Karena itu pentingnya perencanaan dalam pengembangan wisata adalah agar perkembangan wisata sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dan berhasil mencapai sasaran yang dikehendaki, baik itu ditinjau dari segi ekonomi, sosial, budaya dan

lingkungan hidup. Pertumbuhan wisata yang tidak terkendali sebagai akibat dari perencanaan akan menimbulkan dampak yang tidak baik dan tentunya akan merugikan semua pihak [15].

Dalam perencanaan pengembangan wisata alam dan pendidikan lingkungan di KHDTK Cikampek, pengelola kawasan perlu melibatkan stakeholder terkait. *Stakeholders* dalam sektor ekowisata adalah siapapun yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sektor ekowisata. Mereka adalah penduduk lokal, pemerintah daerah, LSM, sektor swasta, pengunjung maupun pihak lain yang tidak secara langsung terkait dengan ekowisata [7]. Menurut Cooksey dan Kikula dalam Adiyoso (2009:57), pendekatan perencanaan pembangunan harus terbuka dan melibatkan masyarakat sehingga para perencana dan masyarakat dapat mengkombinasikan pendekatan “dari atas ke bawah” dan “dari bawah ke atas”. Masyarakat lokal merupakan pihak-pihak yang secara langsung akan terkena dampak bagi kebijakan pengelolaan kawasan. Kegiatan pengembangan ekowisata merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, jadi kebutuhan dari masyarakat ini juga perlu ditampung.

Sejauh ini belum ada penelitian yang menganalisis perencanaan pengembangan wisata alam dan pendidikan lingkungan di KHDTK Cikampek, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis proses perencanaan, faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan pengembangan wisata alam dan pendidikan lingkungan di KHDTK Cikampek, serta keterlibatan *stakeholders* dalam perencanaan pengembangan wisata alam dan pendidikan lingkungan di KHDTK Cikampek.

METODE PENELITIAN

Jenis dari penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis ingin memaparkan secara deskriptif tentang perencanaan pengembangan wisata alam dan pendidikan lingkungan di KHDTK Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Penelitian ini dilakukan di KHDTK Cikampek. Adapun pertimbangan pemilihan lokasi, antara lain: (1) KHDTK Cikampek merupakan sebuah kawasan hutan penelitian yang telah mengalami dinamika perkembangan yang menarik, yaitu adanya kegiatan pengembangan wisata alam dan pendidikan lingkungan; (2) Pengembangan wisata alam dan pendidikan lingkungan merupakan wacana yang

baru digagas di awal tahun 2012, sehingga masih perlu untuk dilakukan kajian terutama terhadap proses perencanaannya; (3) Dalam pengembangan kegiatan wisata alam dan pendidikan lingkungan, pihak pengelola telah melibatkan stakeholders lain yang terkait. Hal ini menarik karena selama ini dalam pengelolaan kawasan tersebut, pihak pengelola belum banyak melibatkan pihak-pihak lain. (4) Masyarakat sekitar sangat mengharapkan adanya kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, dan kegiatan pengembangan wisata alam dan pendidikan lingkungan menjadi alternatif yang tepat.

Penggalian data dan informasi dilakukan dengan mengkaji dokumen yang berkaitan dengan perencanaan pengembangan wisata alam dan pendidikan lingkungan di KHDTK Cikampek seperti dokumen Rancangan Teknis KHDTK, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), laporan pengelolaan KHDTK, laporan kegiatan, Surat Keputusan (SK) penetapan dan penggunaan KHDTK, aturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lain yang terkait. Peneliti juga melakukan interview (wawancara) terhadap informan yang dipilih secara sengaja. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang berperan dan terlibat dalam perencanaan pengembangan wisata alam dan pendidikan lingkungan di KHDTK Cikampek. Informan berasal dari Puslitbang Peningkatan Produktivitas Hutan (Pusprohut), Sekretariat Badan Litbang Kehutanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang, dan masyarakat sekitar kawasan yang terdiri dari Komite Pengelola Pariwisata (KPP), Kelompok Pedagang, kelompok petani, serta pengunjung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Perencanaan

Perencanaan pengembangan wisata alam dan pendidikan lingkungan di KHDTK Cikampek menggunakan pendekatan *top-down planning*. Pendekatan ini merupakan sebuah perkembangan yang cukup penting, dimana pihak pengelola (Puslitbang Peningkatan Produktivitas Hutan) mulai melakukan kerjasama dengan *stakeholders* lainnya seperti pemerintah daerah dan juga masyarakat setempat.

Dinamika perkembangan KHDTK Cikampek telah membawa banyak perubahan baik dari segi pemanfaatan kawasan maupun dari segi pengelolaannya. Hal ini juga membawa dampak dalam kegiatan perencanaan. Adanya keterlibatan *stakeholders* lain, yaitu pemerintah

daerah dan masyarakat, perlu diakomodasi segala kebutuhan dan kepentingan mereka.

Menurut Mitchell dkk (2010:253-254) melalui konsultasi dengan masyarakat yang tinggal di wilayah yang akan terkena kebijakan, program, atau proyek, dimungkinkan untuk (1) merumuskan persoalan dengan lebih efektif, (2) mendapatkan informasi dan pemahaman di luar jangkauan dunia ilmiah, (3) merumuskan alternatif penyelesaian masalah yang secara sosial akan dapat diterima, (4) membentuk perasaan memiliki terhadap rencana dan penyelesaiannya, sehingga memudahkan penerapan.

Perencanaan pengembangan wisata alam dan pendidikan lingkungan di KHDTK melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penyiapan Kondisi Pemungkin

Kegiatan penyiapan kondisi pemungkin merupakan bagian awal sebelum kegiatan non penelitian berjalan. Penyiapan dimulai dari kajian kebijakan terhadap segala perundangan pengelolaan KHDTK yang ada. Dalam mempersiapkan pengembangan wisata alam dan pendidikan lingkungan pihak pengelola juga telah melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah terutama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). Jalinan kerjasama ini telah dimulai dengan adanya pertemuan awal pembahasan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pusprohut dan Disbudpar.

2. Kajian Studi Pengembangan Potensi dan Program Wisata, serta Kajian Feasibility Pengusahaan Wisata

Berikut adalah potensi yang dimiliki oleh KHDTK Cikampek yang dapat mendukung kegiatan wisata alam dan pendidikan lingkungan yaitu merupakan ruang terbuka hijau (RTH) terluas di Kab Karawang dan kondisinya masih bagus, memiliki jenis-jenis tanaman eksotis (habitat alamnya di luar negeri), masyarakat setempat yang mendukung kegiatan wisata alam dan pendidikan lingkungan, serta lokasinya yang mudah terjangkau sehingga memudahkan bagi pengunjung yang ingin datang.

3. Penyiapan sumberdaya manusia

Dalam kegiatan penyiapan sumberdaya, Pusprohut telah mengadakan kegiatan "Pelatihan Pengelolaan Dan Pemandu Wisata Tingkat Dasar" di KHDTK Cikampek pada 2-3 Juli 2012. Pelatihan Pengelolaan dan Pemandu Wisata Tingkat Dasar tersebut diikuti oleh masyarakat setempat. Pelatihan Pengelolaan dan Pemandu Wisata ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumberdaya manusia dan pranata sosial di sekitar KHDTK

Cikampek sebagai suatu upaya penyiapan kondisi pemungkin (*enabling condition*) bilamana KHDTK Cikampek akan menjalankan fungsi non penelitiannya melalui kegiatan wisata dan pendidikan lingkungan.

4. Penguatan kelembagaan

Masyarakat menjadi faktor penting dalam pengembangan wisata alam dan pendidikan lingkungan, sehingga pemerintah perlu mendorong masyarakat untuk dapat berpartisipasi dengan nyata. Melalui penguatan kelembagaan masyarakat desa dan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya, diharapkan partisipasi nyata masyarakat terhadap pengembangan wisata alam dan pendidikan lingkungan dapat meningkat.

Tujuan dari kegiatan penguatan kelembagaan adalah: a) meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat/kelompok masyarakat, b) meningkatkan dan memantapkan peran kelembagaan dan organisasi di lingkungan masyarakat, meningkatkan permodalan, usaha ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, d) meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat dalam pengembangan wisata alam dan pendidikan lingkungan di KHDTK Cikampek.

5. Penyiapan infrastruktur dan fasilitas

Infrastruktur memiliki posisi yang sangat penting bagi keberlangsungan kegiatan wisata alam dan pendidikan lingkungan tersebut. Infrastruktur yang sedang direncanakan meliputi sarana *tracking*, penangkaran satwa (kupu-kupu), *outbond*, *paintball*, *sport area*, *camping ground*, dll. Di KHDTK Cikampek, penyiapan infrastruktur dan fasilitas dapat dilakukan kerjasama antara Puslitbang Peningkatan Produktivitas Hutan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Karawang, masyarakat serta pihak swasta. Selain itu perlu pengoptimalan terhadap sarana dan prasarana yang ada.

6. Penyusunan program

Dari hasil kajian terhadap potensi kawasan dirumuskan program dan kegiatan wisata alam dan pendidikan lingkungan. Beberapa program yang akan dikembangkan di KHDTK Cikampek adalah program interpretasi berbagai jenis pohon KHDTK Cikampek, rencana pembuatan penangkaran kupu-kupu, memperkenalkan satwa liar KHDTK Cikampek, serta melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain diantaranya perkemahan pelajar, dan kegiatan lain.

7. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan terhadap stakeholder dan pihak-pihak terkait lain secara luas untuk

mensosialisasikan program dan kegiatan pengembangan wisata alam dan pendidikan lingkungan di KHDTK Cikampek. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan dapat menarik dukungan dari berbagai pihak agar kegiatan pengembangan wisata alam dan pendidikan lingkungan dapat berjalan dengan baik.

8. Pelaksanaan dan implementasi kegiatan

Pelaksanaan atau implementasi kegiatan merupakan hal yang paling penting dalam pengembangan wisata alam dan pendidikan lingkungan. Tanpa implementasi yang baik semua proses perencanaan akan sia-sia. Pada tahapan pelaksanaan atau implementasi ini, keterlibatan Puslitbang Peningkatan Produktivitas Hutan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Masyarakat menjadi elemen penting, meskipun tidak menutup kemungkinan akan melibatkan pihak lain.

9. Monitoring dan evaluasi

Dalam pengembangan wisata alam dan pendidikan lingkungan di KHDTK Cikampek, evaluasi dan *monitoring* juga diperlukan untuk memonitor dan melakukan tindakan korektif apabila dalam pelaksanaan kegiatan wisata telah mengganggu konservasi lingkungan.

Proses perencanaan pengembangan wisata alam dan pendidikan lingkungan di KHDTK Cikampek dapat digambarkan menjadi tiga kegiatan yaitu pengambilan kebijakan, proses perencanaan itu sendiri dan pelaksanaan. Conyers dan Hills (1990:15), menggambarkan proses perencanaan melalui tiga aktivitas yang saling berhubungan, dimana aktivitas yang satu diikuti aktivitas yang lainnya, yaitu diawali dengan pengambilan kebijakan (*policy making*), dikembangkan melalui proses perencanaan, dan kemudian diimplementasikan [2].

Dari ketiga kegiatan utama tersebut aktor yang berperan dibedakan menjadi 3 aktor yaitu: 1) pengambil kebijakan atau yang membuat keputusan politis; 2) perencana (*planners*), yaitu orang yang memegang perencanaan karena posisi ataupun pelatihan profesional yang diperolehnya; dan 3) implementasi yang dilakukan secara terpisah oleh administrator.

Pengambil kebijakan dalam kegiatan wisata alam dan pendidikan lingkungan adalah para pimpinan di Puslitbang Peningkatan Produktivitas Hutan. pengambilan kebijakan ini didasarkan pada peraturan perundangan yang ada dengan melihat adanya dinamika perkembangan pengelolaan kawasan. Aktor kedua adalah perencana. Di dalam perencanaan pengembangan wisata alam dan pendidikan

lingkungan ini perencana tersebut adalah tim perencana yang terdiri dari para perencana di lingkup Puslitbang Peningkatan Produktivitas Hutan, dan dapat melibatkan pemerintah daerah yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta akademisi sebagai konsultan pembantu. Aktor ketiga adalah para pelaksana yang dalam hal ini adalah setiap *stakeholders* yang terlibat mulai dari Pemerintah, masyarakat, pihak swasta dan juga pihak-pihak lain yang terkait.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perencanaan

Perencanaan pengembangan wisata alam dan pendidikan lingkungan di KHDTK Cikampek juga dipengaruhi oleh beberapa faktor baik eksternal maupun internal yang dapat bersifat sebagai pendorong maupun sebagai penghambat.

Faktor yang mempengaruhi perencanaan pengembangan wisata alam dan pendidikan lingkungan adalah faktor sumberdaya manusia, faktor lingkungan, faktor potensi, dan faktor dana/anggaran. Untuk lebih jelasnya akan dibahas satu persatu sebagai berikut:

a. Faktor Sumberdaya Manusia (SDM) Perencana

Dalam perencanaan pengembangan wisata ini, pihak pengelola telah melakukan kerjasama dengan pihak akademisi yang berkompeten dalam bidang pengembangan wisata alam dan pendidikan lingkungan. Pihak pengelola sendiri memiliki tenaga perencana yang kompeten terdiri dari tenaga struktural dan tenaga fungsional atau peneliti lingkup Badan Litbang Kehutanan. Para perencana ini memiliki kompetensi di bidangnya dan dapat bekerjasama dengan konsultan pembantu dari akademisi untuk melaksanakan proses perencanaan dan menghasilkan rumusan perencanaan yang baik. Dalam proses perencanaan pembangunan, perencana selaku SDM perencanaan merupakan faktor utama yang menggerakkan pelaksanaan perencanaan [8].

b. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan juga mempengaruhi perencanaan pengembangan kawasan. Ada tanggapan yang positif dari *stakeholders* terkait yaitu pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Pemerintah menyambut baik kerjasama pengembangan wisata alam dan pendidikan lingkungan di KHDTK Cikampek. Masyarakat setempat juga telah mempersiapkan diri untuk terlibat dalam pengembangan kawasan dengan membentuk kelompok yaitu Komite Pengelola Pariwisata (KPP). Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004:16), faktor lingkungan baik

itu internal maupun eksternal memiliki pengaruh yang kuat terhadap berhasil tidaknya program perencanaan pembangunan [8].

c. Faktor kebijakan

Berdasarkan kajian kebijakan yang telah dilakukan, wacana pengembangan wisata alam dan pendidikan lingkungan tidak bertentangan dengan kebijakan yang ada. Wisata alam dan pendidikan lingkungan merupakan pengembangan terhadap salah satu kriteria dalam pengelolaan KHDTK yaitu manfaat non penelitian. Namun ada sedikit permasalahan terkait dengan kebijakan yang ada, bahwa sampai saat ini Permenhut tentang pengelolaan KHDTK belum ada. Padahal dalam PP no. 12 tahun 2010 disebutkan bahwa penggunaan dan pengelolaan KHDTK akan diatur dengan peraturan menteri.

d. Faktor dana / anggaran

Faktor lain yang ikut mempengaruhi perencanaan pengembangan wisata alam dan pendidikan lingkungan adalah faktor dana/anggaran. Selama ini dana yang tersedia di Pusprohut jumlahnya tidak cukup besar dan hanya digunakan untuk mendukung kegiatan litbang. Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004:39), dalam proses perencanaan pembangunan harus sudah diperhitungkan atau diperkirakan secara seksama mengenai berapa dan dari mana dana yang akan mendukungnya sehingga tidak ada hasil perencanaan pembangunan yang tidak diperhitungkan kemungkinan dukungan dananya [8].

Keterlibatan Stakeholder dalam Perencanaan

Desentralisasi telah membuka peluang bagi banyak pihak untuk terlibat dalam pengelolaan hutan. Sementara itu muncul kesadaran dari *stakeholders* untuk menuntut hak mereka, misalnya masyarakat lokal yang selama ini telah dikesampingkan oleh pemerintah tiba-tiba sadar akan hak-haknya. Perbedaan kepentingan dari berbagai pihak itu jika tidak dipahami dan dicari jalan tengah akan dapat menyebabkan konflik. Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004:195), dalam proses pembangunan perlu sekali mengetahui pelaku-pelaku yang berbeda ini, beserta kepentingan dan harapan mereka, kekhawatiran serta potensi mereka yang dapat disumbangkan pada usaha pembangunan yang menyeluruh di daerah tersebut [8].

Dalam pengelolaan KHDTK sebagai lokasi ekowisata, *stakeholders* yang dimaksud meliputi siapa pun yang mempengaruhi dan dipengaruhi

oleh sektor ekowisata. Mereka adalah penduduk lokal, pemerintah, kelompok masyarakat nirlaba (LSM atau yang sejenis), sektor swasta, wisatawan, dan pihak lain yang tidak secara langsung terkait dengan ekowisata [7].

Secara umum *stakeholders* yang terlibat dalam perencanaan pengembangan wisata alam dan pendidikan lingkungan di KHDTK Cikampek terbagi menjadi tiga yaitu pemerintah, akademisi, dan masyarakat:

a. Pemerintah

Pemerintah yang terkait dengan pengelolaan KHDTK Cikampek adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat disini adalah Puslitbang Peningkatan Produktivitas Hutan sebagai pengelola kawasan. Sedangkan pemerintah daerah kabupaten Karawang yang dilibatkan dalam pengelolaan wisata di KHDTK Cikampek adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). Dengan adanya kerjasama antara Pusprohut dan Disbudpar ini diharapkan dapat mengoptimalkan pengembangan ekowisata, terutama terkait dengan perizinan, pembangunan infrastruktur, pembinaan, dan *sharing* keuntungan.

Pemerintah memiliki peran strategis mengembangkan kebijakan sektor ekowisata dan penunjangnya. Kebijakan mencakup perangkat perundangan strategis seperti penataan ruang konservasi hingga instrumen teknis perihal layanan investasi, yang diperankan oleh pemerintah pusat hingga daerah (lokal). Outputnya bisa berupa kebijakan penetapan kawasan, instrumen fiskal, moneter atau khusus pengembangan wilayah ekowisata.

Pada dasarnya pemerintah bertanggungjawab terhadap pengelolaan kawasan. Dalam posisi ini pemerintah menetapkan aturan pokok perihal batasan wilayah, potensi, perlindungan dan penyelamatan, perencanaan pengelolaan, infrastruktur partisipasi sektor swasta, dan pemberdayaan penduduk lokal. Kebijakan fiskal meliputi perpajakan (dan tarif), investasi dalam prasarana infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia hingga dukungan aspek keamanan [7].

Pemerintah selaku pemegang kebijakan, bertanggung jawab atas pemanfaatan sumberdaya hutan dan menjaganya agar tetap lestari. Upaya pemerintah untuk melakukan regulasi pemanfaatan hutan, melatar belakangi munculnya berbagai kebijakan sebagai pendukung pola pengelolaan hutan.

Pemerintah mempunyai otoritas dalam

pengaturan, penyediaan, dan peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata. Tidak hanya itu, pemerintah bertanggungjawab dalam menentukan arah yang dituju perjalanan pariwisata. Kebijakan makro yang ditempuh pemerintah merupakan panduan bagi stakeholder yang lain di dalam memainkan peran masing-masing.

b. Akademisi

Akademisi merupakan *stakeholders* mitra pemerintah. Pihak akademisi yang menjadi mitra dari Pusprohut adalah Fakultas Kehutanan IPB, yang saat ini telah melakukan kajian terhadap potensi ekowisata dan pengembangannya. Akademisi ini menjadi sumber saran atau produk akademik sebagai bahan perumusan kebijakan. Produk itu dapat berupa identifikasi potensi, pemetaan, nilai ambang batas sumberdaya, ide-ide pengembangan, konsep perencanaan dan pengelolaan, hingga metode pelaksanaan. Hasil-hasil penelitian merupakan wujud manfaat sosial yang dapat digunakan untuk kepentingan publik, khususnya wilayah ekowisata. Mereka merupakan sumber inspirasi bagi operasional pengelolaan kawasan.

c. Penduduk lokal/masyarakat setempat

Penduduk lokal/masyarakat setempat menjadi bagian penting dalam pengembangan wisata alam dan pendidikan lingkungan termasuk juga dalam proses perencanaannya. Pihak perencana perlu secara aktif melibatkan masyarakat dengan adanya pertemuan-pertemuan atau diskusi-diskusi untuk menyerap masukan, saran dan pemikiran yang dapat mendukung kegiatan pengembangan kawasan.

Menurut Nugroho (2011: 88), penduduk lokal berperan sebagai subyek dan obyek dalam pengembangan ekowisata. Sebagai subyek, pola pikir, kelembagaan lokal dan kearifan penduduk lokal dapat diadopsi dalam proses perencanaan [7]. Penduduk lokal juga dapat berperan aktif, melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan, dalam ragam kegiatan ekonomi jasa ekowisata. Sebagai obyek, penduduk lokal dan lingkungannya memerlukan sentuhan pengelolaan agar tercapai tujuan upaya-upaya konservasi dan menghasilkan aliran manfaat bagi banyak pihak. Perlu diciptakan kebijakan yang mampu menyeimbangkan atau memelihara aliran manfaat kepada penduduk lokal. Mereka perlu diberikan kesempatan aktif mengidentifikasi, mengolah dan menjual produk dan jasa wisata yang khas sesuai dengan lingkungannya.

Masyarakat lokal ini sudah lebih dulu terlibat dalam pengelolaan aktivitas pariwisata sebelum ada kegiatan pengembangan. Masyarakat telah mulai membuka warung-warung penjual makanan dan minuman. Untuk mengefektifkan pihak pengelola membentuk kelompok pedagang. Pembentukan kelompok ini sebagai wadah kegiatan usaha agar memudahkan koordinasi, interaksi antara anggota dapat ditingkatkan dan kesetiakawanan serta kegotongroyongan dapat dibangun dan dikembangkan. Hal ini dapat bermanfaat untuk mengenali permasalahan bersama serta merumuskan langkah penanganan masalah diantara anggota [10].

Kelompok lain yang dibentuk adalah kelompok petani hutan. Keberadaan kelompok ini tidak kontinyu, hanya aktif ketika ada program litbang *agroforestry*. Saat ada kegiatan *agroforestry*, kelompok masyarakat ini aktif dalam kegiatan penelitian yang dilakukan. Mereka juga membantu kegiatan penelitian di KHDTK Cikampek mulai dari penyiapan lahan, penanaman bibit, sampai pemeliharaan. Mereka juga diperbolehkan menanam tanaman pertanian di sekitar tanaman penelitian dengan kewajiban menjaga tanaman penelitian agar tetap tumbuh dengan baik.

Masyarakat sekitar KHDTK Cikampek juga berinisiatif membentuk sebuah lembaga, yaitu Komite Pengelola Pariwisata (KPP) yang menginginkan keterlibatan dalam pengelolaan pariwisata. Perlu adanya komunikasi yang baik antara pihak pengelola, pemerintah daerah dan kelompok ini dalam mencari kesepahaman terhadap pengelolaan wisata KHDTK Cikampek dengan tetap menjunjung nilai-nilai konservasi. Selain pengelolaan wisata nantinya juga tidak boleh mengganggu fungsi utama kawasan sebagai tempat kegiatan litbang kehutanan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan pengembangan wisata alam dan pendidikan lingkungan di KHDTK Cikampek telah melibatkan banyak stakeholder lain terkait. Tahapan perencanaan pengembangan wisata alam dan pendidikan lingkungan di KHDTK Cikampek adalah: 1) Penyiapan Kondisi Pemungkin, 2) Kajian Studi Pengembangan

Potensi dan Program Wisata, 3) Kajian Feasibility Pengusahaan Wisata, 4) Penyiapan sumberdaya manusia, 5) Penguatan kelembagaan, 6) Penyiapan infrastuktur dan fasilitas, 7) Penyusunan program, 8) Sosialisasi, 9) Pelaksanaan dan implementasi kegiatan, 10) Monitoring dan evaluasi. Secara umum terbagi menjadi 3 tahapan yaitu pengambilan keputusan/kebijakan, proses perencanaan dan implementasi.

2. Faktor yang mempengaruhi perencanaan pengembangan wisata alam dan pendidikan lingkungan adalah faktor sumberdaya manusia, faktor lingkungan, faktor potensi, dan faktor dana/anggaran.
3. Perencanaan pengembangan wisata alam dan pendidikan lingkungan di KHDTK Cikampek melibatkan banyak stakeholder terkait. Pemerintah memiliki peran strategis terutama terkait dengan kebijakan sektor ekowisata dan penunjangnya. Akademisi atau peneliti memiliki peran menjadi sumber saran atau produk akademik sebagai bahan perumusan kebijakan dan perencanaan sekaligus juga sebagai konsultan pembantu, masyarakat setempat dapat memberikan masukan, saran dan pemikiran melalui forum-forum pertemuan-pertemuan dengan pemerintah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan terhadap fokus permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat peneliti sarankan sebagai berikut :

1. Dalam perencanaan pengembangan wisata alam dan pendidikan lingkungan sebelumnya perlu adanya kesepahaman antara pihak-pihak terkait. Kesepahaman tersebut perlu diikat secara legal melalui Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman.
2. Proses perencanaan perlu mengkombinasikan pendekatan *topdown* dan *bottom up*. Masyarakat lokal secara langsung akan terkena dampak bagi kebijakan pemerintah dalam pembangunan. Peran aktif masyarakat dalam perencanaan pengembangan kawasan perlu ditingkatkan melalui pertemuan-pertemuan atau diskusi dengan tim perencana. Pemikiran dan ide dari masyarakat dapat menjadi masukan dalam perencanaan pengembangan wisata alam dan pendidikan lingkungan di KHDTK Cikampek.

3. Salah satu faktor yang menghambat perencanaan pengembangan wisata alam dan pendidikan lingkungan di KHDTK Cikampek adalah masalah dana/anggaran. Seyogianya tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dari pemerintah sendiri yaitu Pusprohut dan Disbudpar dan instansi lain. Namun jika tetap menjadi kendala dapat mulai menjalin kerjasama dengan pihak swasta dengan sistem *sharing* keuntungan.
 4. Perlu adanya payung hukum tentang pengelolaan KHDTK berbentuk peraturan menteri kehutanan (Permenhut) yang mengatur pengelolaan KHDTK secara menyeluruh. Sesuai dengan amanat dalam PP no. 12 tahun 2012 bahwa penggunaan dan pengelolaan KHDTK lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Menteri.
 5. Agar mudah dalam penjangkauan pemikiran, ide, masukan saran yang dapat membantu perencanaan pengembangan wisata alam dan pendidikan lingkungan, perlu dibentuk paguyuban masyarakat.
 6. Melakukan pertemuan dengan masyarakat terkait dengan penataan kawasan terutama tentang relokasi terhadap warung-warung, lapangan parkir dan juga akses jalan. Hal ini semua pihak dapat memberikan masukan dan saran sehingga kebijakan yang akan dilakukan nantinya tidak mendapat pertentangan dari pihak-pihak terkait.
 7. Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada di KHDTK Cikampek, terutama *Information center* yang lama terbengkalai. *Information center* ini dapat digunakan sebagai media pemberitahuan/pengumuman kepada masyarakat dan pengunjung tentang kegiatan-kegiatan di KHDTK Cikampek. Dan perlu disediakan kotak saran untuk menampung masukan dan saran dari masyarakat maupun pengunjung.
 8. Pengoptimalan peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan melakukan koordinasi dengan dinas-dinas lain untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang ada di kawasan seperti kondisi jalan, penerangan, dan juga masalah sampah.
- the Third World. John Wiley & Sons. Brisbane.
 - [3]. Damanik, Janianton dan Helmut F. Weber. 2006. Perencanaan Ekowisata. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
 - [4]. Gufron. 2009. Perencanaan Pengembangan Obyek Wisata Pantai Parangtritis Kec. Kretek Kab Bantul Pasca Gempa Bumi 27 Mei 2006. Tesis. Malang: UB.
 - [5]. Hakim, Luchman. 2004. Dasar-Dasar Ekowisata. Malang: Bayumedia Publishing
 - [6]. Mitchell, Bruce dkk. 2010. Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan. Jogjakarta: GadjahMada University Press.
 - [7]. Nugroho, Iwan. 2011. Ekowisatadan Pembangunan Berkelanjutan. Yogyakarta: PustakaPelajar.
 - [8]. Riyadidan Dedy Supriadi Bratakusumah. 2004. Perencanaan dan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
 - [9]. Simonds. J.O. and Barry W. Starke. 2006. Landscape Architecture: A Manual of Environment Planning and Design. New York: Mcgraw-Hill Book Company. 396p.
 - [10]. Soemarno. 2006. Model Pengelolaan Sumber Daya Hutan untuk Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat. Malang: Agritek YPN.
 - [11]. Tjokroamidjojo, Bintoro. 1989. Perencanaan Pembangunan. Jakarta: CV. Haji Massagung.
 - [12]. Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. Pembangunan Ekonomi, Jilid 1, Edisi 9. Diterjemahkan oleh Haris Munandar. Jakarta: Penerbit Erlangga.
 - [13]. Undang-Undang no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
 - [14]. Wiati, Catur Budi. 2005. Kepentingan Nasional atau Lokal? Konflik Penguasaan Lahan di Hutan Penelitian Sebulu di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Bogor: Center for International Forestry Research.
 - [15]. Yoeti, Oka A. 1997. Perencanaandan Pengembangan Pariwisata. Jakarta: Pradnya Paramita.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Adiyoso, Wignyo. 2009. Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat. Surabaya: CV. Media Putra Nusantara.
- [2]. Conyers, Diana & Peter Hills. 1990. An Introduction to Development Planning in